

Indonesia dalam Pusaran Masa Pandemi: Strategi Solidaritas Sosial Berbasis Nilai Tradisi Lokal

Yaspis Edgar N. Funay 

Magister Sosiologi Agama
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

Korespondensi: yaspis.edgar@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Studi Literatur

Sitasi Cantuman:

N. Funay, Yaspis Edgar. (2020). Indonesia dalam Pusaran Masa Pandemi: Strategi Solidaritas Sosial berbasis Nilai Tradisi Lokal. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(2), 107-120.

DOI: doi.org/10.22373/jsai.v1i2.509

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh JSAI

Dikirim: 15 Juni 2020

Diterima: 3 Juli 2020

Dipublikasi: 31 Juli 2020

ABSTRACT

This paper will describe and analyze the elaboration of local cultural values as a force of social solidarity in Indonesia during the current pandemic. Furthermore, the purpose of this paper will be to explore how social solidarity based on local cultural values can not only be a local resistance but can also create a space for negotiation and elaboration to find a solution in the current pandemic. Therefore, the data collection method used in the form of studying facts through literary sources will then be tested for relevance to the reality that is happening in the community. Using a cultural ethics perspective this paper will examine the extent to which values, ethics, and cultural morals can play a role in social solidarity in Indonesia. In the end, this paper will explore the elaboration of the concept of local Indonesian tradition with the policies carried out by the government as part of the concept of social solidarity and the nearest way out to maintain the survival of the Indonesian people in the midst of the current pandemic vortex.

Keywords: *Solidarity, Social, Culture, Pandemic*

Abstrak

Tulisan ini akan mendeskripsikan dan menganalisa elaborasi nilai kebudayaan lokal sebagai sebuah kekuatan solidaritas sosial di Indonesia dalam masa pandemi saat ini. Lebih lanjut, tujuan tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana solidaritas sosial yang didasari oleh nilai-nilai kebudayaan lokal tidak hanya dapat menjadi local resistance, tetapi juga dapat menciptakan ruang negosiasi dan elaborasi guna mencari jalan keluar di tengah masa pandemi saat ini. Maka dari itu, metode pengumpulan data yang digunakan berupa pengkajian fakta melalui sumber-sumber literatur, kemudian akan diuji relevansinya dengan realitas yang sedang terjadi di masyarakat. Menggunakan perspektif etika kebudayaan tulisan ini akan mengkaji sejauh mana nilai, etika, dalam moral kultural dapat berperan dalam solidaritas sosial di Indonesia. Pada bagian akhir, tulisan ini akan mengeksplorasi elaborasi konsep tradisi lokal Indonesia dengan kebijakan yang di usung oleh pemerintah sebagai bagian sebuah konsep solidaritas sosial dan jalan keluar terdekat guna menjaga keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia di tengah pusaran pandemi yang sedang terjadi.

Kata kunci: *Solidaritas, Sosial, Kebudayaan, Pandemi.*

A. Pendahuluan

Tulisan ini akan mengeksplorasi dan mengelaborasi nilai kebudayaan lokal sebagai sebuah kekuatan solidaritas sosial di Indonesia dalam masa pandemi saat ini. Lebih dalam, proses elaborasi yang dimaksud adalah mencari sebuah jalan keluar mutakhir terhadap permasalahan solidaritas sosial dengan memanfaatkan nilai budaya lokal yang ada di Indonesia. Penulis mengambil periode masa pandemi karena kecenderungan individualitas yang terjadi terkait dengan pemenuhan kebutuhan pribadi tentu sangat tinggi presentasinya di Indonesia. Pembahasan mengenai solidaritas sosial atau sebuah sistem kerja sama yang didasari oleh rasa sepenanggungan bersama telah diteliti oleh berbagai tokoh. Emile Durkheim membagi solidaritas menjadi dua bentuk, yaitu solidaritas mekanik dan organik. Masyarakat yang di tandai oleh solidaritas mekanik menjadi satu karena mereka memiliki aktivitas, pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Sebaliknya, masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organik bertahan bersama justru karena adanya perbedaan di dalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda (Ritzer, 2012). Senada dengan itu, Jacques Derrida mengatakan bahwa relasi serta pertautan identitas baru dapat terjadi jika diawali dengan sebuah keterbukaan terhadap kedatangan yang lain dalam keberlainannya tanpa mengevaluasi, mereduksi, atau melakukan proses penyamaan terhadap yang lain (Norris, 1985). Di samping itu, Neil Smelser dalam tulisannya juga menjelaskan bahwa solidaritas sosial sebagai sebuah perilaku kolektif jelas memerlukan sebuah kepercayaan fundamental untuk menjadikannya sebuah tindakan sosial yang positif untuk menghadapi ketegangan, pergeseran, ekspansi, maupun dominasi struktur yang tidak wajar (Smelser, 1963).

Di Indonesia penelitian tentang solidaritas sosial ataupun perilaku kolektif telah dilakukan oleh Piet H. Khaidir. Ia mengatakan bahwa kesadaran kolektif penting untuk menjadi sebuah dasar atau landasan, karena bagaimanapun ia inspiratif bagi lahirnya komunitas yang plural tanpa memandang kelas, strata ekonomi, dan budaya. Yang terpenting mereka bisa menjadi personal atau komunitas kreatif yang berpartisipasi aktif mendorong terciptanya gerakan kreatif dan progresif ketika bersinggungan dengan kepentingan bersama (Khaidir, 2006). Lebih dalam daripada itu, Izak Lattu dalam tulisannya mengatakan bahwa kesadaran kolektif yang dapat menjadi alasan sebuah solidaritas sosial dapat muncul karena adanya pertemuan dengan yang berbeda. Hal tersebut kemudian dapat membentuk sebuah frame berpikir yang baru bagi individu atau komunitas (I. Lattu, 2016). Namun, penelitian-penelitian tersebut masih meninggalkan cela karena belum melihat bagaimana solidaritas sosial yang didasari oleh nilai-nilai kebudayaan lokal tidak hanya dapat menjadi *local resistance*, tetapi juga dapat menciptakan ruang negosiasi dan elaborasi guna mencari jalan keluar di tengah masa pandemi saat ini. Cela tersebut yang secara khusus akan dieksplorasi oleh penulis dalam penulisan ilmiah ini. Sehingga tulisan ini nantinya akan mencapai tujuan penulisan

berupa menganalisa nilai budaya lokal Indonesia untuk mengatasi retakan relasi sosial masyarakat di tengah masa pandemi yang sedang terjadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), solidaritas adalah sifat (perasaan) solider, sifat satu rasa (senasib), perasaan setia kawan yang pada suatu kelompok anggota wajib memilikinya. Sedangkan sosial adalah berkenaan dengan masyarakat, perlu adanya komunikasi dalam usaha menunjang pembangunan, suka memperhatikan kepentingan umum (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988). Konsep solidaritas diperkenalkan dalam teori sosiologi oleh Emile Durkheim pada tahun 1858. Menurut Durkheim, solidaritas merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar mereka (Ritzer, 2012).

Jika kita melihat ke belakang, banyak contoh kasus yang telah membuktikan bahwa nilai budaya lokal bisa di jadikan salah satu solusi terdekat dalam menghadapi masa pandemi, beberapa diantaranya adalah Praktik isolasi yang biasa dilakukan oleh suku Merangin di Jambi. Suku Merangin percaya orang sakit atau keno isi tanah diyakini sangat terkait dengan dinamika alam sehingga mereka akan diberi tempat tinggal sebuah pondok di hutan, dan semua kebutuhan pokoknya akan dipenuhi oleh masyarakat setempat. Di samping itu, ada juga masyarakat merapu yang membagikan hasil panen mereka kepada masyarakat sekitar setelah dipersembahkan kepada Yang Maha Kuasa. Hal tersebut dilakukan karena mereka percaya sistem tersebut merupakan bagian dari bahu-membahu orang Sumba sesuai dengan filosofi lokal ("Program Peduli," n.d.).

Untuk melihat kekuatan dalam aspek kebudayaan, teori Michael D. Jackson akan membantu penulis untuk membedah topik tersebut, ia mengatakan bahwa gaya pemikiran yang harus ditinggalkan saat ini adalah metode generalisasi yang berlaku untuk semua konteks permasalahan. Ia menambahkan bahwa setiap daerah memiliki dimensi sosial, budaya, dan adat yang berbeda. Jadi sudah seharusnya dieksplorasi agar ada kesinambungan yang jelas antara kenyataan dan taraf pemikiran (Jackson, 2016). Hal ini menjadi penting karena tidak seperti banyak negara di mana diskusi tekstual mendominasi wacana di ruang publik, banyak daerah di Indonesia menggunakan bentuk kultural atau kebudayaan sebagai sarana wacana di ruang publik. Didaerah-daerah Maluku, Toraja, dan Jawa Tengah, meskipun orang memiliki bahan yang ditulis dengan baik, keaksaraan hanya berfungsi untuk mendukung proses komunikasi lisan dalam kebudayaan setempat. Fakta tersebut dibenarkan oleh Izak Lattu. Ia menambahkan bahwa orang dapat berkomunikasi dengan lebih efektif melalui bentuk

lisan: ritual, simbol, dan narasi verbal dalam bingkai kebudayaan lokal masing-masing daerah (I. Y. M. Lattu, 2019).

B. Metode

Metode dalam kajian ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan dengan mengumpulkan data-data sebagai fakta yang benar melalui sumber-sumber literatur. Lebih lanjut, penulis juga akan menggunakan data pelengkap berupa realitas sosial yang sedang terjadi, baik secara langsung maupun melalui surat kabar, ataupun diskusi. Pertama-tama dipaparkan perspektif kajian entografi dan ranah-ranah kebudayaan. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang adanya keunikan dan kekhasan nilai kebudayaan setiap daerah yang ada di Indonesia. Bagian terakhir menguraikan sejumlah perspektif serta menarik benang merah antara teori, analisis data, dan temuan-temuan yang dihasilkan. Setelah melakukan dan menghubungkan langkah-langkah di atas, tulisan ini diharapkan memberi bingkai elaborasi yang ideal dan dapat di relevansikan dengan konteks permasalahan yang sedang dihadapi.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Memilah Aspek Positif dalam Kebudayaan Lokal

Perlu diingat bahwa setiap manusia sudah dilahirkan dengan kemampuan kulturalnya masing-masing. Oleh karena itu, setiap manusia sudah pasti akan terikat dengan nilai-nilai kebudayaan sejak ia dilahirkan ke dunia. Lebih dalam daripada itu, kemampuan kultural nantinya menyediakan ruang bagi potensi-potensi nilai kebudayaan. Beberapa diantaranya adalah potensi estetis dan religiositas. Potensi estetis adalah kemampuan merasai kehidupan dari segala keindahannya. Sedangkan potensi religiositas adalah kemampuan manusia untuk menghayati hidup yang disumberkan pada Yang Ilahi sang pencipta sumber makna dan acuan hidupnya (Sutrisno, 2009).

Sesuai dengan penjelasan di atas, jika manusia ingin mengikuti sebuah alur pemikiran dalam kebudayaan paling tidak ia harus memilah sisi kultural agar menjadi sebuah panduan yang transformatif. Hal ini berarti setiap sudut kebudayaan harus disertai dengan kritik agar tetap menyeimbangkan pemikiran atau secara langsung memberikan efek kebaruan pada kebudayaan yang sedang di pegang. Sutrisno dalam tulisannya menunjukkan adanya 3 jenis pengetahuan kebudayaan mengenai realitas hidup. Pengetahuan pertama, adalah informasi atau refleksi akal sehat seumumnya yang dengan gagasan atau pikiran fungsinya mengiyakan atau mengamini kenyataan apa adanya. Pikiran ini sifatnya hanya mengafirmasi saja atau menggaris bawahi realitas (Sutrisno, 2009).

Kedua, jenis pikiran konfrontatif yang berarti melawan pendapat yang ada dan menjadi antitesis dari tesis yang ada. Dan Ketiga, arus pikiran kritis yang bergerak dan

berjuang lantaran tujuan sebuah gagasan seharusnya membebaskan, transformatif, dan mengkritisi pendapat-pendapat kebudayaan yang irasional menjadi rasional. Dengan kata lain, dinamika kebenaran akan dibawa ke ranah diskursus sehingga dapat terus menerus didialogkan dan dikomunikasikan (Sutrisno, 2009).

Melanjutkan 3 dasar pemikiran kritis di atas, Michael D. Jackson dalam bukunya yang berjudul *As Wide As The World Is Wise* menuliskan bahwa hanya filsafat tradisional yang menggunakan klaim universal untuk semua konteks manusia yang ada, sedangkan filsafat modern akan menghindari hal tersebut (Jackson, 2016). Lebih dalam daripada itu, perlu diketahui bahwa selain perspektif universal dan global, masyarakat juga memiliki ruang atau dimensi pemikiran lokal yang tidak bisa diabaikan dalam proses mengidentifikasi atau mengklarifikasi keadaan dan model tindakan (Jackson, 2016). Dengan gambaran konsep inilah nantinya para sosiolog dapat menjelaskan berbagai gejala yang selama ini menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Dengan konsep ini pula nantinya teori sosial, etika, dan gap identitas dapat ditafsir ulang sesuai dengan konteks yang dihadapi.

Dalam skema berpikir Jackson, ada beberapa poin penting yang dapat dijadikan landasan pijak guna meletakkan sebuah teori kebudayaan. Salah satunya adalah mengangkat cara hidup masyarakat lokal sebagai sebuah teori ritual eksistensial yang mengatur moral dan tindakan manusia berbasis mitos dan ritus adat (Jackson, 2016). Langkah ini menjadi penting karena setiap individu yang ada di Indonesia sudah tentu akan sangat kental dengan tradisi kebudayaannya masing-masing. Oleh karena itu, dengan tetap menggunakan pemikiran kritis, eksistensi kebudayaan lokal dapat dijadikan sebuah tongkat pembimbing atau penunjuk arah untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Poin selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki dan menghidupkan kembali paradigma berpikir yang mengambil konsep dasar dari pengalaman hidup lokal (kondisi eksistensial) sebagai sebuah proses yang sadar dan disengaja (Jackson, 2016). Erving Goffman dalam konsep panggungnya menyebutkan bahwa setiap manusia hidup dalam panggung drama yang akan banyak menampilkan setting dan personal front sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam masyarakat (Stone, 1957). Dengan adanya upaya menjadikan kebudayaan lokal sebagai sebuah paradigma berpikir baru diharapkan dapat menjadi sebuah ruang berkumpul bersama yang "asli" karena memiliki tujuan dan musuh bersama yang harus segera dihadapi. Tentu teori di atas perlu diuji jika dihadapkan dengan sebuah permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat. Hal lain yang juga perlu di perhitungkan adalah faktor eksternal berupa moral dalam masyarakat merupakan faktor pendukung yang sangat penting untuk seseorang dapat melakukan sebuah tindakan sosial. Perlu diingat pula bahwa sebelum seseorang melakukan sebuah tindakan sosial, setiap individu akan dihadapkan dengan sebuah pertimbangan sosial. Keadaan ini bisa jadi merupakan

sebuah suasana pikiran yang sangat rumit sehingga memerlukan sebuah alat atau *tools* dalam setiap perhitungannya. Dalam tahap inilah nantinya kebudayaan lokal dapat dijadikan sebuah *tools* guna tercapainya sebuah tujuan bersama yang sifatnya universal atau mencakup semua golongan dalam suatu komunitas masyarakat.

Dengan skema umum di atas, menurut Jackson nilai dalam sebuah konsep kebudayaan bisa dijelaskan dengan sistematis sebagai sebuah alat yang menuntun kehidupan manusia dalam bentuk moral dan akal sehat berbasis mitos dan ritus lokal. Nantinya akan dibahas juga mengenai hubungan antar manusia termasuk di dalamnya terdapat relasi dengan sesama makhluk hidup lain, kaitannya dengan sebuah kehidupan yang berdampingan dan berbagai tindakan di dalamnya. Di samping itu juga cara manusia menggambarkan perjumpaan wajah orang lain dengan ilustrasi realitas empiris yang lebih rasional (Jackson, 2016).

Jackson juga menambahkan bahwa setiap individu itu unik dengan segala apa yang telah ia dapatkan dari modal sosial masyarakat di masing-masing tempat. Oleh karena itu, ukuran nilainya pun akan berbeda sesuai dengan moral yang terbentuk dalam sebuah masyarakat (Jackson, 2016). Hal ini kemudian didukung dengan berbagai pertimbangan sosial yang ditemukan berbeda berdasarkan filosofi budaya dan keadaan etnografi yang berbeda, walaupun masih dalam satu dataran atau wilayah besar (Jackson, 2016). Sebelum diterapkan, konsep-konsep kebudayaan jelas sudah diuji dengan berbagai macam kecocokan keadaan sosial masyarakat, nilai yang dianut dalam sebuah kelompok, dan adat yang dipertahankan turun temurun oleh para pendahulu mereka (Jackson, 2016).

Kembali ke awal konsep pemikiran ini selalu mengingatkan semua elemen masyarakat mengenai sebuah pemikiran kritis yang tidak hanya mengiyakan keadaan lalu membiarkan "status quo", tetapi mengubahnya dalam transformasi mulai dari pencerahan irasionalitas menjadi rasionalitas dan perubahan dari ketidak-merdekaan untuk berbahasa, berwacana ke arah wacana yang mengubah tata hidup bersama menjadi lebih baik (Sutrisno, 2009). Oleh karena itu, sudah seharusnya studi-studi kebudayaan keragaman keindonesiaan semestinya ditaruh dalam ruang luas yang disadari sebagai sebuah kritik kebudayaan. Semakin luas dan banyak ruang kritik kebudayaan, semakin pula kita tidak perlu menangis-nangis dalam wacana histeris bahwa pendekatan kultural di Indonesia kalah dan "dikalahkan" secara sadar oleh hasrat kapital (baca uang) dan hasrat kuasa (baca politisasi dalam simbolik lomba kursi jabatan) (Sutrisno, 2009).

2. Indonesia dalam Balutan Kebudayaan

Indonesia adalah negara kepulauan yang terluas di muka bumi. Jumlah pulaunya lebih dari 17.000, etnisitas, sub-kultur, dan bahasa lokalnya ratusan. Bahkan di Papua saja misalnya, tidak kurang dari 252 suku dengan bahasa khasnya masing-masing. Dari sisi keragaman budaya (pluralisme) ini saja, menunjukkan bahwa fakta ini merupakan

mukjizat sejarah yang bernilai sangat tinggi (Maarif, 2010). Sejak awal pergerakan kemerdekaan, para pendiri negara telah sadar dengan kenyataan pluralitas etnik dan agama. Bahkan gerakan nasionalisme dipelopori oleh kelompok-kelompok belajar yang berasal dari etnik tertentu seperti Boedi Oetomo, Perkumpulan Ambon, Jong Celebes, Jong Sumatra dan lain-lain (I. Lattu, 2019).

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hidup bersama dalam masyarakat berbeda agama dan budaya menjadi tantangan masyarakat modern. Bagaimana mengatur masyarakat multikultural adalah persoalan klasik yang dihadapi oleh banyak masyarakat bangsa saat ini. Para ahli merumuskan masyarakat multikultural sebagai perbedaan budaya, termasuk agama, atau perbedaan yang melekat pada budaya (*culturally embedded differences*) (Parekh, 2001). Tetapi lebih daripada itu, perlu diingat juga bahwa identitas primordial yang terbentuk dari berbagai macam kebudayaan tersebut memiliki kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi jalan keluar terdekat sesuai dengan konteks kehidupan di daerah masing-masing.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan isu kerusakan lingkungan misalnya, Masyarakat tradisional Marapu Sumba memiliki sebuah semboyan hidup yang berbunyi, "matawai amahu pada njara hamu". Ungkapan ini berarti mata air emas, padang kuda yang hijau, yang oleh masyarakat adat kemudian dijadikan sebuah kesempatan bersama untuk membangun Sumba. Semboyan hidup ini nantinya juga mengandung unsur kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, kehidupan yang makmur, dan termasuk mencakup masalah ekologis atau relasi antara manusia dan alam (Djera, 2019).

Elaborasi nilai-nilai kebudayaan guna menyelesaikan suatu permasalahan umum memang bukan hal baru dalam realitas sosial di Indonesia. Dari Masyarakat Merapu di Sumba mari beralih ke Bali, di masa pandemi covid-19 saat ini, Bali menjadi salah satu wilayah yang berhasil menekan laju penyebaran virus tersebut. Mengutip dari laman Liputan 6, keberhasilan Bali menanggulangi penyebaran covid-19 dikarenakan hasil sinergisitas antara penanganan virus dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali. Lebih lanjut, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa ritual adat lokal dan keagamaan sangat membantu masyarakat akar rumput untuk tetap terkoordinasi dengan program kesehatan dan keamanan yang diarahkan oleh pemerintah setempat. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor utama keberhasilan penanganan covid-19 berjalan sesuai dengan arahan dan instruksi pemerintah pusat.

Di daerah seperti Maluku, Toraja, dan Jawa Tengah, ritual, atau dimensi sosial ritual, memainkan peran penting dalam memperkuat kohesi dan mengikat komunitas bersama. Ritual membantu masyarakat untuk mengingat masa lalunya dan membentuk masa kini. Dalam konteks Maluku, Ritual dan makna tentang mitos telah menjadi landasan bersama yang mengikat suatu komunitas (I. Y. M. Lattu, 2019). Berdasarkan budaya Maluku jejaring yang disebut *pela*, fungsi ritual untuk menciptakan masa lalu

kolektif di masa kini. Melalui ritual orang mengingat sumpah leluhur untuk mencintai sekarang dan mengantisipasi masa depan. Lebih dalam, Ritual kebudayaan lokal (panas pela) adalah pertunjukan ritual di mana orang-orang dari desa yang memiliki latar belakang agama dan latar belakang berbeda, datang bersama untuk berpartisipasi dalam acara antar identitas tersebut (I. Y. M. Lattu, 2019).

Pada saat yang sama, sebuah ritual di Tana Toraja menciptakan lokus komune (kesamaan) untuk solidaritas sosial di luar batas-batas agama. Orang-orang di Tana Toraja menandai kehidupan melalui ritualisasi: ritual kesedihan (rambu solo) dan ritual kebahagiaan (Rambu Tuka). Acara ritualistik di Toraja menyoroti ruang penciptaan mental dan moral bersama untuk keterlibatan antar agama Toraja dengan berbagi kisah kekerabatan. Meskipun mereka berasal dari agama yang berbeda, relasi kebudayaan lokal tersebut mendorong orang Toraja untuk berpartisipasi dalam semua bentuk ritual orang-orang dari agama lain. Ritual di Toraja juga menandai sebuah ingatan kolektif yang memberikan rasa rindu pada komunitas atau sistem solidaritas yang berakal pada kebudayaan lokal di sana.

Fakta yang sama juga terjadi di Jawa Tengah. Banyak nilai tradisi lokal dan ritualisasi berfungsi sebagai jembatan bagi komunitas antar agama yang dibalut dengan tradisi nilai luhur masyarakat Jawa. Saat ini, hampir semua ritual dan kebudayaan Jawa dapat dijadikan sebuah ruang terbuka untuk semua penduduk terlepas dari afiliasi agama, dan berfungsi sebagai lambang hubungan antar agama. Clifford Geertz dalam penelitiannya mengklaim bahwa Halal Bihalal merupakan sebuah prosesi saling memohon ampun yang berangkat dari persilangan budaya asli Jawa dan ajaran Islam. Lebih lanjut, Geertz berpendapat bahwa Halal Bihalal datang dari perayaan Jawa (riyaya) dan Idul Fitri Islam (Idul Fitri) yang berpusat pada pengampunan (Flint, 1962). Pada titik ini, ritual Bihalal Halal berfungsi sebagai ruang solidaritas sosial antar keluarga ataupun kerabat yang memiliki identitas berbeda (agama bahkan budaya), di mana setiap orang dari berbagai latar belakang mengakui adanya perbedaan dalam sebuah komunitas sosial tertentu (I. Lattu, 2018).

3. Restorasi Sosial Berbasis Nilai Tradisi Lokal

Tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan hidup di Indonesia sering kali menggunakan identitas primordial (kebudayaan) sebagai jurang pemisah ataupun alasan konflik antar masyarakat. Pengalaman sebagai masyarakat majemuk seperti Indonesia memang tidak mudah untuk mempertahankan dan merawatnya. Hal ini mau menunjukkan bahwa keanekaragaman suku bangsa yang dimiliki Indonesia si satu pihak menjadi kekayaan dan kekayaan nasional, namun di lain pihak mengandung konsekuensi yang tidak ringan yakni potensi konflik antar suku dalam suatu komunitas masyarakat yang majemuk. Seperti yang kita ketahui bahwa kebudayaan atau kesukaan seseorang merupakan sebuah identitas, jati diri, dan pedoman bagi kehidupannya. Oleh

karena itu, menjadi penting untuk membicarakan identitas kebudayaan seseorang yang kemudian sangat rekat dengan sikap, perilaku, ataupun nilai-nilai keyakinan individu maupun kelompok (Retnowati, 2016).

Sadar atau tidak, seseorang sudah tentu akan menjalani kehidupannya dengan berpedoman pada kebudayaan atau moral kesukumannya. Kebudayaan yang merekat pada individu tidak hanya diwariskan secara genetik, tetapi juga didapatkan melalui sebuah proses belajar yang panjang. Proses ini bersifat menyerap serta mencakup semua aspek kehidupan dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia (Retnowati, 2016). Kaitannya dengan hal itu juga modal kesukuan tersebut nantinya akan mempengaruhi etika, moral, pengambilan sikap, dan keyakinan seseorang. Fakta ini mau menunjukkan bahwa antara kebudayaan dan manusia (individu ataupun kelompok) memiliki keterkaitan yang sangat mendalam, mencakup keadaan fisik ataupun mental manusianya.

Melanjutkan penjelasan di atas, seharusnya semua sampai pada pertanyaan, “bisakah identitas kesukuan atau kebudayaan menjadi sebuah fase kritis yang penuh dengan keresahan akan nilai etika tertinggi, tetapi juga sigap terhadap segala dinamika sosial pada realitas di sekitarnya?”. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis merumuskan paling tidak ada empat langkah yang harus dilalui untuk mencapai sebuah solusi sosial yang menempatkan kebudayaan di keadaan yang setara dalam pusaran realitas sosial dan kemajuan zaman saat ini. Empat (4) langkah tersebut adalah kesediaan untuk membuka ruang terhadap kebudayaan, penerimaan, negosiasi sosial, dan elaborasi antara kebudayaan dan realitas sosial di tengah pandemi yang sedang terjadi.

Harus diakui bahwa dalam kenyataannya teori dan rumusan di atas tentu bukan suatu hal yang mudah. Ketakutan akan adanya sebuah konflik yang mengatasnamakan identitas kebudayaan tertentu menjadi sebuah penghalang yang sangat besar. Namun, di sinilah letak pentingnya langkah pertama yaitu keterbukaan atau kerelaan untuk membuka ruang terhadap keberadaan “yang lain”. Langkah ini dapat menjadi sebuah pintu untuk terjadinya sebuah interaksi atau pengenalan terhadap adanya realitas lain di luar “kita”. Mendukung pendapat ini, Goffman mengatakan bahwa dalam dramaturgi kehidupan manusia tidak sepenuhnya mengikuti teks yang diberikan kepadanya tetapi manusia menciptakan teksnya sendiri. Oleh Karena itu, semua aktivitas individu yang mempengaruhi orang lain dalam pertemuan langsung tersebut (Stone, 1957). Dengan analisa dasar seperti itu, menjadi benar bahwa keterbukaan menjadi sebuah langkah awal yang baik untuk terciptanya sebuah relasi sosial antar kebudayaan guna menghadapi realitas yang terjadi di sekitarnya.

Untuk melanjutkan pola keterbukaan yang sudah terlaksana, suatu relasi sosial membutuhkan sebuah penerimaan. Penerimaan antar kebudayaan yang bersifat mendalam dan menyeluruh akan mempengaruhi kehidupan komunitas, sebagaimana akan terwujud dalam cara berpikir, merasakan, berbicara, dan bertindak (Suparlan,

2004). Lebih lanjut, dalam fase penerimaan ini sudah pasti akan terjadi sebuah interaksi yang intens dan progresif. Interaksi akan terjadi sebagai sebuah bentuk penghargaan terhadap yang berbeda. Pada tingkatan ini pula, dialektika dalam interaksi menjadi salah satu unsur yang sangat penting karena memberikan inspirasi untuk masuknya gagasan lebih umum seperti kemanusiaan ke ruang publik. Karena bagaimanapun, setiap ide baik punya hak untuk disampaikan (Funay, 2020). Perlu diingat bahwa, dalam fase ini harus dilakukan dengan semangat progresif bersama yang tidak menghilangkan elemen kritis dalam setiap wacana publiknya.

Dalam terang semangat kritisisme inilah kemudian masyarakat majemuk masuk ke dalam langkah berikutnya berupa ruang negosiasi. Negosiasi yang dimaksud adalah berupa mengusahakan nilai-nilai positif dari kebudayaan masuk ke dalam ruang publik Indonesia. Hal ini bukan dilakukan tanpa alasan, tetapi lebih kepada pemanfaatan ciri khas yang sudah ada sejak dahulu dalam konteks Indonesia. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Penulis setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Jackson yang mengatakan bahwa setiap individu itu unik dengan segala apa yang telah ia dapatkan dari modal sosial masyarakat di masing-masing tempat. Oleh karena itu, ukuran nilainya pun akan berbeda sesuai dengan moral yang terbentuk dalam sebuah masyarakat (Jackson, 2016). Jelas data yang telah disampaikan di awal menunjukkan masing-masing daerah di Indonesia memiliki kebudayaan, kebiasaan, dan ciri khasnya masing-masing. Fakta inilah yang nantinya perlu dimanfaatkan secara positif oleh pengambil kebijakan.

Dalam ruang demokrasi yang didukung dengan sistem dialektika yang progresif, tidak ada salahnya untuk mencapai sebuah fase ideal bernama elaborasi sosial. Elaborasi atau pencampuran yang dimaksud adalah lebih kepada pencampuran nilai kebudayaan lokal dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah setempat. Walaupun demikian elaborasi yang dimaksud tidak serta merta mengerdilkan atau menghilangkan tradisi-tradisi lokal masyarakat, tetapi dipelihara, dikritisasi, dan direfleksikan dalam realitas sosial yang terjadi di sekitarnya. Elaborasi sosial yang bersifat etis ini tampaknya menjadi strategi terbaik yang dapat diambil oleh pemerintah melihat konteks masyarakat di masing-masing tempat. Hal inilah yang sebelumnya digunakan oleh Wayan Koster sebagai gubernur Bali, memanfaatkan nilai-nilai kebudayaan lokal masyarakat untuk mengerakkan masyarakat (akar rumput) untuk menekan laju perkembangan covid-19 di wilayahnya. Fakta yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Sumba, masyarakat adat Marapu membagi-bagikan hasil panen yang lebih kepada masyarakat sekitar bahkan di tengah masa pandemi karena adanya kesadaran dan ajaran kecintaan terhadap semua makhluk ciptaan termasuk sesamanya manusia. Tidak hanya itu, memanfaatkan nilai-nilai kebudayaan Jawa, Toraja, Maluku, dan lain-lain dengan kritis kemungkinan besar bisa diterapkan dalam setiap konteks masyarakat di masing-masing wilayah Indonesia. Solidaritas sosial jelas tidak hanya menjadi khayalan semata

jika pemerintah menggunakan sebuah jalan keluar yang dekat dan mudah dimengerti oleh masyarakat setempat.

Walaupun nilai multikulturalisme dalam solidaritas sosial yang membuka ruang bagi presentasi perbedaan dalam ruang publik hanya dapat terjadi ketika negara mendorong pendidikan warga negara (citizenship education) untuk memahami nilai etis yang lebih tinggi, tetapi masyarakat secara mandiri juga dapat mengusahakannya jika ruang-ruang elaborasi diusahakan masuk dalam realitas sosial di masyarakat. hal ini nantinya dapat mendorong Multikulturalisme tidak hanya berhenti pada keterbukaan struktur politik terhadap perbedaan, tetapi ruang kehidupan sehari-hari menjadi pentas hubungan warga lintas agama dan budaya terutama dalam masa pandemi yang tidak jelas kapan berakhirnya.

Pola yang tergambar dalam skema di atas oleh John Hick disebut dengan berbagi ruang atau tempat dengan orang lain demi tujuan yang lebih besar dan mulia (Hick, 1980). Pada fase ini juga, antara satu identitas dan yang lainnya saling memberikan pemahaman baru tentang penyatuan nilai lokal masing-masing guna mencari sebuah jalan keluar menghadapi masa-masa sulit bersama-sama. Dengan demikian proses elaborasi semacam ini dapat memberikan penegasan bahwa nilai kebudayaan lokal sebenarnya terletak pada aktualisasi dan sikap kritisnya menghadapi problematik sosial seperti masa pandemi saat ini. Identitas kultural kemudian terletak pada sikap yang diambil untuk kepentingan umum dan posisi etisnya menyikapi suatu permasalahan. Lalu selanjutnya, Semakin kuat integrasi budaya suatu daerah, semakin kuat pula proses pemilahan dampak negatif ataupun positif dari problematika yang terjadi saat ini (Funay, 2020). Wacana ini bukan tanpa alasan karena pada dasarnya budaya manusia tidak anti terhadap pembangunan, masalah sosial, lompatan budaya ataupun kemajuan zaman, akan tetapi nilai kultural membantu meletakkan perubahan dan problematik pada tempatnya tanpa mengganggu aspek kehidupan lain yang sudah berjalan.

D. Penutup

Keanekaragaman kultural di Indonesia merupakan sebuah fakta yang tidak dapat dielakkan oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di dalamnya. Sudah tentu dalam hal ini, seluruh masyarakat dihadapkan dengan jurang pemisah yang begitu lebar terkait dengan perbedaan identitas tersebut. Namun, dibalik rangkaian ketakutan akan dampak negatif sebuah identitas kultural tersebut setiap masyarakat masih memiliki pilihan lain yang lebih masuk akal, yaitu mengelaborasi nilai-nilai unik kebudayaan dengan segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna menghadapi musuh bersama yang lebih urgen.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Indonesia membutuhkan sebuah jalan keluar yang mudah dimengerti dan dekat dengan konteks masyarakat di masing-masing wilayahnya. Lebih lanjut, karena sifat pandemi yang meliputi geografis yang luas dan

konteks Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan konteks kebudayaannya masing-masing. Hal tersebut jelas membutuhkan sebuah kebijakan yang kontekstual dan transformatif. Berkaca pada teori Jackson mengenai keunikan nilai tradisi pada masing-masing tempat, menjadi jelas bahwa dalam konteks Indonesia yang sangat rekat dengan kebudayaan lokalnya elaborasi sosial menjadi salah satu jalan keluar yang mudah dipahami oleh masyarakat. Untuk mencapai sebuah solidaritas yang solid di tengah masa pandemi saat ini, nilai-nilai kebudayaan lokal dapat dijadikan sebuah kekuatan atau dasar moral untuk mengakomodasi perasaan kolektif masyarakat. Di samping itu, adanya elemen kritis dalam untuk kebudayaan menjadikan sebuah gerakan solidaritas yang berbasis nilai kultural tidak hanya menjadi local resistance, tetapi juga dapat menciptakan sebuah ruang transformasi dalam kehidupan masyarakat di tengah pusaran pandemi saat ini.

Perhatian terhadap adanya suatu permasalahan dan musuh bersama seperti masa pandemi covid-19 saat ini, harus menjadi perhatian semua kalangan dalam seluruh tingkatan dalam masyarakat Indonesia. Dengan adanya penggabungan nilai kebudayaan lokal dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, maka akan menciptakan visi bersama serta memicu setiap orang untuk berpikir secara kritis dan progresif tentang penanganan permasalahan pandemi yang sedang terjadi saat ini. Sudah saatnya kebudayaan lokal tidak hanya dipandang hanya sebagai sebuah identitas primordial saja, tetapi lebih daripada itu sebagai jalan keluar yang ramah, dekat dan mudah dipahami masyarakat untuk tetap melanjutkan kehidupan di masing-masing wilayah Indonesia. Sehingga bisa menekan kecenderungan individualitas yang terjadi terkait dengan pemenuhan kebutuhan pribadi di tengah masa pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya.

Daftar Pustaka

- Djera, A. (2019). Ecosophy: Kesadaran akan harmonisasi Kehidupan Ciptaan di Tanah Merapu. In *Bagi Tuhan Jangan Ditunda: Teks Kehidupan Gereja di Sumba* (p. 228). Satya Wacana University Press.
- Flint, J. T. (1962). THE RELIGION OF JAVA. By Clifford Geertz. Glencoe, Ill.: The Free Press of Glencoe, 1960. 392 pp. \$7.50. *Social Forces*, 40(3), 277-278. <https://doi.org/10.2307/2573647>
- Funay, Y. (2020). Sabalong Samalewa: Falsafah Hidup sebagai Local Ethic dalam Relasi Lintas Agama di Tana Sumbawa. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Hick, J. (1980). *God has Many Names*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-16308-3>
- Jackson, M. (2016). *As wide as the world is wise: Reinventing philosophical anthropology*. Columbia University Press.
- Khaidir, P. H. (2006). *Nalar kemanusiaan, nalar perubahan sosial* (Cet. 1). Teraju.
- Lattu, I. (2016). Performative Interreligious Engagement: Memikirkan Sosiologi Hubungan Lintas Agama. In *Sosiologi Agama Pilihan berteologi di Indonesia* (p. 278). Fakultas Teologi UKSW.
- Lattu, I. (2018). Halal Bihal in Javanese Interreligious Family Perspective. Seminar the Center for the Study of Religion, Pluralism and Democracy, Satya Wacana University.
- Lattu, I. (2019). PUBLIC PERFORMANCE MODERASI BERAGAMA DALAM MULTIKULTURALISME DAN PLURALISME AGAMA DI INDONESIA. In *Mozaik Moderasi Beragama dalam Perspektif Kristen* (p. 2). BPK Gunung Mulia.
- Lattu, I. Y. M. (2019). Beyond Interreligious Dialogue: Oral-Based Interreligious Engagements in Indonesia. Volume 10: *Interreligious Dialogue*, 70-90. https://doi.org/10.1163/9789004401266_006
- Maarif, A. S. (2010). *Politik identitas dan masa depan pluralisme kita* (Cet. 1). Pusat Studi Agama dan Demokrasi : Yayasan Wakaf Paramadina.
- Norris, C. (1985). *Margins of Philosophy*. By Jacques Derrida (Trans. Alan Bass). The University of Chicago Press. 1982. 330 pp. *Romance Studies*, 3(1), 43-54. <https://doi.org/10.1179/ros.1985.3.2.43>
- Parekh, B. (2001). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. *Ethnicities*, 1(1), 109-115. <https://doi.org/10.1177/146879680100100112>

- Program Peduli. (n.d.). Program Peduli. Retrieved June 21, 2020, from <http://programpeduli.org/en/>
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Ed.). (1988). Kamus besar bahasa Indonesia (Edisi 1). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia.
- Retnowati. (2016). Agama dan Kebudayaan Bangsa Sebagai Kekuatan Nasional: Refleksi Terhadap Dinamika Perjalanan Bangsa Indonesia dalam Merawat Kemajemukan Suku Bangsa. In Sosiologi Agama Pilihan Berteologi di Indonesia (p. 90). Fakultas Teologi UKSW.
- Ritzer, G. (2012). Teori Sosiologi; dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Pustaka Pelajar.
- Smelser, N. J. (1963). Theory of collective behavior. The Free Press of Glencoe. <https://doi.org/10.1037/14412-000>
- Stone, G. P. (1957). The Presentation of Self in Everyday Life. Erving Goffman. American Journal of Sociology, 63(1), 105–105. <https://doi.org/10.1086/222140>
- Suparlan, P. (2004). Hubungan antar-sukubangsa. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Sutrisno, M. (2009). Ranah-ranah kebudayaan: Dalam esai. Kanisius.